1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pada Triwulan II 2026, stabilitas makroekonomi Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam fase konsolidasi pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Tekanan inflasi tahunan *(year-on-year)* di daerah ini mulai melandai secara bertahap, tercermin dari angka inflasi yang tercatat sebesar 3,67% pada April, kemudian bergerak ke level 4,22% pada Mei, dan ditutup pada angka 4,47% pada Juni. Meskipun angka penutupan Juni tersebut masih memerlukan perhatian ekstra di regional Kalimantan, tingkat inflasi tahun berjalan *(year-to-date)* Kalsel hingga akhir triwulan ini masih terjaga di level yang aman, yaitu sebesar 2,22%.

   Dinamika harga barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) sepanjang triwulan ini sangat dipengaruhi oleh faktor musiman konsumsi serta fluktuasi cuaca yang berdampak pada hasil panen lokal. Komoditas hortikultura seperti aneka cabai dan produk peternakan seperti telur ayam ras sempat melonjak akibat tingginya permintaan rumah tangga selama momen lebaran, sebelum akhirnya berangsur stabil di bulan Juni seiring masuknya pasokan tambahan. Sementara itu, meskipun harga beras lokal kualitas unggulan masih bertahan tinggi akibat masa panen yang belum merata, gejolak harga di tingkat konsumen berhasil diredam secara efektif melalui masifnya penyaluran Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh BULOG sebagai instrumen penyeimbang pasar. Di sektor perikanan, keterbatasan aktivitas nelayan akibat cuaca buruk di perairan selatan membuat pasokan ikan segar dan ikan nila budi daya sempat terganggu, sehingga memberikan andil pada inflasi kategori *volatile food*.

   Di luar sektor pangan, pergerakan harga barang lainnya dan jasa turut memberikan tekanan tambahan *(sideline pressure)* pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Selatan. Kenaikan harga emas perhiasan secara konsisten menjadi penyumbang inflasi non-pangan utama, yang terdorong oleh tren kenaikan harga komoditas emas di pasar global akibat ketidakpastian geopolitik. Selain itu, kelompok pengeluaran transportasi mengalami tekanan akibat penyesuaian tarif angkutan udara selama arus mudik dan balik lebaran serta musim libur sekolah, yang kemudian diikuti oleh penyesuaian biaya jasa kesehatan secara spasial serta persiapan biaya administrasi pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

   Melihat ke depan, TPID Kalimantan Selatan mengidentifikasi beberapa risiko utama yang berpotensi mengganggu stabilitas harga pada triwulan berikutnya. Faktor cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di perairan selatan masih menjadi ancaman serius karena dapat menghambat pelayaran kapal logistik yang mengangkut bapokting dari Pulau Jawa, sehingga berisiko memicu keterlambatan bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan menyebabkan kelangkaan stok di tingkat pedagang. Selain itu, siklus musiman tahun ajaran baru pada sektor pendidikan serta celah rantai distribusi yang panjang pada komoditas pangan tertentu juga berpotensi memicu spekulasi harga di pasar lokal. Guna memitigasi berbagai risiko tersebut, TPID Kalsel terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pengawasan stok distributor secara berkala, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyasar langsung wilayah-wilayah dengan andil inflasi tinggi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   - **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan April 2026.**

Pada April 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan yang mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,13% (mtm). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,50% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan pada April 2026 tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,83% (yoy). Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok dengan andil deflasi terdalam di Provinsi Kalimantan Selatan. Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas emas perhiasan sejalan dengan terkoreksinya harga emas dunia.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Mei 2026**

Pada Mei 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan yang mengalami inflasi sebesar 0,24% (mtm) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,28% (mtm). Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,04% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menjadi kelompok dengan andil inflasi tertinggi secara bulanan (mtm) di Provinsi Kalimantan Selatan. Inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh peningkatan harga komoditas nasi dengan lauk, ikan bakar, dan bakso siap santap yang mengalami peningkatan didorong oleh naiknya harga bahan baku seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Selanjutnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga turut mencatatkan andil inflasi bulanan (mtm) yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas bahan bakar rumah tangga, bensin, dan solar yang didorong oleh kenaikan harga LPG dan BBM non subsidi per 18 April 2026, dengan efek transmisi kenaikan harga ke tingkat konsumen akhir yang masih berlanjut secara bertahap. Selain itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut memberikan sumbangan inflasi bulanan (mtm) seiring dengan kembali meningkatnya harga emas perhiasan sebagai safe haven asset di tengah ketidakpastian global.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Juni 2026**

Pada Juni 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm). Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rerata historis inflasi bulan Juni tiga tahun terakhir yang mencatatkan inflasi 0,13% (mtm) dan inflasi nasional periode Juni 2026 yang tercatat sebesar 0,44% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secar tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,22% (yoy). Kelompok Transportasi menjadi kelompok dengan andil inflasi tertinggi secara bulanan sebesar 0,22% (mtm) di Provinsi Kalimantan Selatan. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi dengan rata-rata kenaikan sebesar 22,7% sepanjang Juni 2026 sebagai dampak

lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, serta kenaikan tarif angkutan udara seiring tingginya permintaan yang bertepatan dengan periode libur sekolah. Selanjutnya, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut mencatatkan andil inflasi bulanan sebesar 0,14% (mtm) yang disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah dan bawang putih akibat naiknya biaya transportasi dari sentra pasok Bima (NTB) dan Jawa serta belum masuknya musim panen (khususnya bawang putih), ditambah kenaikan harga minyak goreng imbas melonjaknya biaya kemasan plastik dan logistik. Selain itu, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran turut memberikan sumbangan inflasi bulanan sebesar 0,05% (mtm) seiring meningkatnya harga nasi dengan lauk, didorong oleh naiknya biaya bahan baku serta biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dan LPG

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah pada Triwulan II (April s/d Juni 2026) menekankan pentingnya penguatan sinergi dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan. Guna mendukung pengendalian inflasi yang berkesinambungan, TPID se-Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat stabilitas harga dan menjamin kecukupan pasokan pangan di seluruh wilayah melalui implementasi berbagai program strategis, antara lain

Periode April 2026

- **Upaya Keterjangkauan Harga**

Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 3,69 tibu ton (32,88% dari target) per 26 April 2026.

- **Upaya Ketersediaan Pasokan**
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementan RI telah melaksanakan Gerakan Tanam Padi Serempak pada lokasi Cetak Sawah di Desa Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut bersamaan dengan 17 provinsi lainnya pada tanggal 9 Maret 2026. Pada kegiatan tersebut, dilakukan penanaman padi pada lahan seluas 2,6 ribu hektare hasil cetak sawah di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Telah dilaksanakan kegiatan panen dan tanam serempak hasil optimasi lahan (Oplah) yang dilaksanakan di Desa Kaliring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melibatkan Balai Penyuluh Pertanian serta Poktan Simpang Sanga pada tanggal 30 April 2026.
- **Upaya Kelancaran Distribusi**
- Melakukan monitoring kelancaran distribusi bapokting ke daerah pergudangan distributor di Kawasan Basirih untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya oleh TPID Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan TPID Kota Banjarmasin.
- Melakukan pemeliharaan jalan di Kecamatan Tanjung Selayar sepanjang 10 km guna memperlancar mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- **Upaya Komunikasi Efektif**
- Menghadiri kegiatan HLM TPID Kota Banjarmasin pada tanggal 8 April 2026 yang menekankan pentingnya optimalisasi peran TPID di daerah dengan penguatan sisi supply melalui optimalisasi KAD dan mendukung implementasi program MBG melalui penyediaan bahan pokok serta diversifikasi konsumsi menu.

Pelaksanaan kegiatan Capacity Building dan Studi Tiru TPID se-Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 15-16 April 2026 ke Provinsi Bali yang mempelajari budidaya ayam petelur cage-free serta Rumah Semai Cabai
- Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi mingguan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 di Menara Selatan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Periode Mei 2026

- **Upaya Keterjangkauan Harga**

Upaya yang dilakukan meliputi kegiatan Operasi Pasar/Gerakan Pasar Murah untuk komoditas pangan strategis dengan frekuensi sebanyak 355 kali titik kegiatan yang dilaksanakan s.d Mei 2026 diseluruh Kab/Kota di provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 5,47 tibu ton (48,59% dari target) per 17 Mei 2026

- **Upaya Ketersediaan Pasokan**
- Untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H pada tanggal 20 – 21 Mei 2026 dilaksanakan Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada kegiatan tersebut menjual berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, gula, minyak goreng, sayur mayur serta barang lainnya dengan harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan panen raya jagung secara serentak di Desa Banyu Hirang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2026.
- Selain itu, program cetak sawah seluas 30 ribu hektare di Provinsi Kalimantan Selatan mulai menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini, sekitar 14 ribu hektare lahan hasil cetak sawah tersebut telah berhasil ditanami padi, dan sebagian di antaranya telah mulai memasuki masa panen.
- **Upaya Kelancaran Distribusi**
- Dalam rangka meningkatkan kelancaran akses jalan angkutan telah dilakukan perbaikan infrastruktur jalan dari persimpangan menuju Tanjung Seloka hingga Tanjung Ujung di Kabupaten Kotabaru. Proyek ini menargetkan peningkatan kualitas jalan beraspal sepanjang kurang lebih 13 kilometer guna memperlancar mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
- Selanjutnya, dalam rangka menjaga kelancaran distribusi energi, telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Mei 2026
- **Upaya Komunikasi Efektif**
- TPID Provinsi Kalimantan Selatan turut menfasilitasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada tanggal 6 mei di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk menajamkan strategi pengendalian inflasi daerah, yang didukung oleh penguatan penyediaan data ekonomi serta pemantauan harga yang lebih solid. Selanjutnya, fasilitasi juga dilakukan pada kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Mei 2026 yang menekankan pada langkah-langkah antisipasi menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta kesiapan teknis Kota Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi tahun 2028.

-

Periode Juni 2026

- **Upaya Keterjangkauan Harga**
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kios Pangan DPKP Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
- Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 8,09 ribu ton (71,88% dari target) per 29 Juni 2026.
- **Upaya Ketersediaan Pasokan**
- Telah dilaksanakan budidaya padi apung di Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin pada 19 Juni 2026 yang berhasil membuahkan hasil dengan produktivitas panen mencapai 6 ton gabah per hektare di lahan rawa.
- Panen raya jagung kuartal kedua di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada pertengahan Juni 2026 sukses terlaksana guna memperkuat ketersediaan pasokan pakan dan pangan daerah.
- Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi di Kalimantan Selatan hingga awal Juni 2026 menunjukkan progres signifikan dengan capaian luasan menyentuh 244.873 hektare.
- **Upaya Kelancaran Distribusi**

Dalam rangka memastikan kelancaran logistik, pada 9 Juni 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menfasilitasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Pemko Banjarmasin melakukan Capacity Building penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) diantaranya membahas rencana pemotongan jalur distribusi dari daerah produsen langsung ke pasar konsumen.

- **Upaya Komunikasi Efektif**
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan langkah penanganan di daerah dengan data dan kebijakan pusat.
- Fasilitasi pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Banjarbaru menggelar High Level Meeting (HLM) TPID masing-masing pada tanggal 25 Mei dan 9 Juni 2026 untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar tidak terjadi hambatan pasokan di tingkat hilir.
- Pelaksanaan koordinasi dengan BPS Kalimantan Selatan terhadap pengembangan inovasi Early Warning System (EWS) – Kawal Inflasi sebagai instrumen deteksi dini tekanan harga pada komoditas pangan strategis guna mendukung respons kebijakan yang lebih cepat dan terukur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2026 menunjukkan performa yang responsif dan konsisten menjaga momentum pemulihan stabilitas harga pasca-puncak HBKN serta masa libur sekolah. TPID Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi intensif dan sinergi kebijakan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, jajaran TNI/POLRI, serta seluruh Satgas Pangan di tingkat kabupaten/kota, baik IHK maupun non-IHK.

Dalam kerangka strategi **4K**, implementasi kebijakan difokuskan pada program-program berdampak langsung sebagai berikut:

- **Keterjangkauan Harga:** TPID se-Kalimantan Selatan secara konsisten mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di wilayah-wilayah dengan andil inflasi tinggi. Langkah ini didukung penuh oleh percepatan penyaluran beras SPHP oleh BULOG secara berkelanjutan guna mengamankan daya beli masyarakat terhadap pangan pokok.
- **Ketersediaan Pasokan:** Penyaluran bantuan pangan nontunai dan bantuan pangan beras tahap berikutnya terus disalurkan secara presisi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kabupaten/kota guna menahan gejolak harga pangan sensitif.
- **Kelancaran Distribusi:** Guna memitigasi dampak cuaca buruk di perairan selatan, TPID mengoptimalkan pemberian subsidi ongkos angkut melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mendatangkan pasokan komoditas hortikultura dari daerah surplus. Selain itu, arus distribusi logistik darat terus didukung oleh peningkatan fungsionalitas jalur alternatif logistik guna mengurai hambatan pasokan menuju pasar-pasar induk. Selain itu sebagai antisipasi dari rilis BMKG yang menyatakan bahwa musim kemarau akan lebih panjang, maka perlu dilakukan upaya mitigasi melalui pembentukan satgas karhutla. Hal ini penting sebagai antisipasi dari pengalaman tahun – tahun sebelumnya dimana pada saat kemarau Panjang atau el nino akan terjadi kebakaran hutan dan lahan pada lahan gambut. Hal ini perlu diantisipasi segera agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu dan tidak mempengaruhi jalur distribusi barang dan jasa bagi Masyarakat.
- **Komunikasi Efektif:** Sinergi komunikasi diperkuat melalui forum koordinasi rutin seperti forum Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) untuk merumuskan langkah taktis cepat, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai belanja bijak demi mencegah perilaku menimbun (*panic buying*). Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi cuaca panas ekstrem di Kalimantan selatan

Melalui kombinasi intervensi jangka pendek yang responsif dan keberlanjutan program jangka panjang—seperti pemantauan berkala stok gudang distributor serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)—TPID Kalimantan Selatan optimis mampu mengawal stabilitas pasokan dan menjaga angka inflasi tetap berada dalam rentang sasaran target nasional hingga akhir tahun.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan Early Warning System dan Kebijakan Berbasis Data :

1. Sebagai tindaklanjut dari HLM TPID Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu mengembangkan inovasi berupa pembuatan **Dashboard Early Warning System (EWS)** untuk pemantauan harga komoditas pangan di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dengan sumber data **SP2KP secara real time** sebagai system peringatan dini pengendalian inflasi daerah. Selain itu EWS tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang cepat, tepat sasaran, dan terukur.
2. Mengoptimalkan penyampaian laporan harian perkembangan harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP.
3. Melakukan pemantauan dan analisis secara berkala terhadap **Indeks Perkembangan**

Harga (IPH) mingguan sebagai salah satu dasar dalam menentukan langkah intervensi pengendalian inflasi.

Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan :

1. Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pasar secara rutin untuk mengetahui kondisi stok dan perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok.
2. Memperkuat pengawasan barang kebutuhan pokok bersama TPID, Satgas Pangan, dan pemangku kepentingan terkait, khususnya terhadap komoditas *volatile food*, antara lain beras, telur ayam, dan daging ayam ras.
3. Melakukan pengawasan pada rantai perdagangan mulai dari pasar tradisional, pasar modern, agen, hingga distributor.
4. Menjaga dan mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instrumen stabilisasi pasokan pangan.
5. Melaksanakan Operasi Pasar, Pasar Murah, dan/atau Gerakan Pangan Murah pada wilayah dan periode yang membutuhkan intervensi guna menjaga keterjangkauan harga masyarakat.

Meningkatkan Produksi Pangan Daerah :

1. Meningkatkan implementasi program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) dalam rangka meningkatkan produksi beras daerah.
2. Mendorong gerakan menanam komoditas hortikultura strategis, antara lain cabai rawit, jagung, dan komoditas pangan lainnya untuk menjaga kesinambungan pasokan.
3. Mendorong penguatan produksi pangan lokal sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Antisipasi Dampak Cuaca dan Perubahan Iklim :

1. Memperkuat kerja sama dengan BMKG dalam pelaksanaan Early Warning System cuaca untuk mengidentifikasi potensi dampak kondisi iklim terhadap sektor pertanian dan pangan.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko gagal panen, puso, kekeringan, dan kebakaran lahan.
3. Mendorong penyampaian informasi peringatan dini kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai dasar penyiapan langkah mitigasi.
4. Mengarahkan langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko terhadap petani dan menjaga kesinambungan produksi pertanian daerah.

Memperkuat Kerja Sama Antardaerah dan Distribusi Pangan :

1. Mendorong TPID Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kerja Sama Antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.
2. Memperkuat koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan komoditas pangan antardaerah, khususnya pada wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
3. Meningkatkan koordinasi TPID Provinsi dengan TPIP serta TPID Kabupaten/Kota agar langkah pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Kesiapsiagaan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional :

1. Menindaklanjuti hasil HLM TPID Kalimantan Selatan melalui kebijakan daerah dalam

rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang HBKN yang dituangkan melalui surat edaran gubernur.
2. Meningkatkan intensitas pemantauan harga dan stok pangan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2026.
3. Menyiapkan langkah intervensi apabila terdapat indikasi gangguan pasokan atau peningkatan harga yang memerlukan penanganan.
4. Melaksanakan pengawasan khusus terhadap ketersediaan hewan ternak sapi dan kambing di pasar hewan guna memastikan kecukupan stok hewan kurban dan mendukung aspek kesehatan hewan.

Pengendalian Tekanan Harga Energi :

1. Mengkampanyekan gerakan hemat energi sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi global yang dapat memengaruhi harga BBM dan LPG di Kalimantan Selatan.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam memantau perkembangan harga dan ketersediaan energi yang berpotensi memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa.

Pengendalian Tekanan Inflasi dari Emas Perhiasan :

1. Meningkatkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat mengenai alternatif instrumen investasi selain emas perhiasan.
2. Mendorong pemahaman masyarakat mengenai pilihan instrumen investasi yang lebih beragam sebagai bagian dari upaya mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas emas perhiasan.

Percepatan Belanja Daerah dan Penguatan Perekonomian :

1. Mendorong percepatan realisasi belanja daerah, khususnya pada proyek strategis pemerintah daerah.
2. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian daerah.
3. Meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dalam rangka memastikan pelaksanaan belanja daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga momentum aktivitas ekonomi masyarakat.